OTORITAS JASA KEUANGAN

SEKTOR JASA KEUANGAN TETAP RESILIEN DIDUKUNG FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN YANG SOLID DI TENGAH MENINGKATNYA RISIKO KETIDAKPASTIAN

"Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga, di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global"

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- Perekonomian global cenderung *divergent* seiring rilis data perekonomian AS yang di bawah ekspektasi, sementara untuk Eropa dan Tiongkok di atas ekspektasi.
- Volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi serta risiko geopolitik yang cenderung meningkat.
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 direvisi ke bawah oleh OECD, dengan PDB global diproyeksikan menjadi 3,1 persen pada 2025 dan 3 persen pada 2026 akibat meningkatnya hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan. OECD juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen di 2025, namun penurunan tersebut masih sejalan dengan *peer countries*.

Amerika Serikat

- PDB triwulan IV tercatat sebesar 2,4 persen qoq, namun pada triwulan I PDB AS diprediksi Fed GDPNow akan terkontraksi.
- Data aktivitas ekonomi cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2 persen.
- The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya dan akan memangkas *Fed Fund Rate* (FFR) hanya 1 hingga 2 kali di tahun 2025.

Tiongkok

Pemerintah meluncurkan stimulus untuk mendorong konsumsi. Seiring dengan hal tersebut, sisi *demand* menunjukkan indikasi perbaikan permintaan seperti peningkatan pada penjualan ritel, penjualan kendaraan, dan harga rumah baru yang mulai meningkat meskipun masih berada di zona kontraksi.

Domestik

- Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional Maret 2025 terjaga sebesar 1,03 persen *yoy*. Inflasi inti di Februari cukup terkendali sebesar 2,48 persen yoy yang menunjukkan permintaan domestik masih cukup baik, namun perlu dicermati beberapa indikator permintaan yang termoderasi.
- Kinerja perekonomian nasional masih solid sejalan dengan hasil tinjauan berkala *Moody's Investors Service* (Moodys) yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level Baa2 dengan *outlook* stabil. Selain itu, Fitch juga mempertahankan *rating* Indonesia di level BBB dengan *outlook* stabil. Hal tersebut merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global.
- *Rating* Indonesia dan posisi indikator kerentanan eksternal yang biasa digunakan menilai daya tahan perekonomian dan pasar keuangan relatif baik dibandingkan *peer countries*:

Defisit Fiskal			*External Debt to* GDP			*Current Account Balance to* GDP		
2,29%	5,2%	7,8%	30,42%	43,9%	19,3%	-0,63%	-2,2%	-1,1%
Indonesia	Turki	India	Indonesia	Turki	India	Indonesia	Turki	India

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)

IHSG

6.510,62

27 Mar'25 | -8,04% *ytd*

Jumlah Investor

15,77 Juta

27 Mar'25

Nilai Kapitalisasi Pasar

Rp 11.126 T

27 Mar'25

Nilai Penawaran Umum

Rp 57,68 T

27 Mar'25

NAB Reksa Dana

Rp 493,91 T

27 Mar'25

Pasar Derivatif Keuangan

31 Maret 2025

- 31 Pelaku
- 5 Penyelenggara
- Rp710,63 T akumulasi nilai

Securities Crowdfunding

26 Maret 2025

- 18 penyelenggara berizin OJK
- Rp 1,49 Triliun total dana yang dihimpun
- 785 penerbitan efek
- 177.717 pemodal

Perdagangan Karbon

s.d 27 Maret 2025

- Rp77,91 miliar Akumulasi Nilai Perdagangan
- 1.598.693 tCO2e Volume Unit
- 111 pengguna jasa yang mendapatkan izin

PERBANKAN (PBKN)

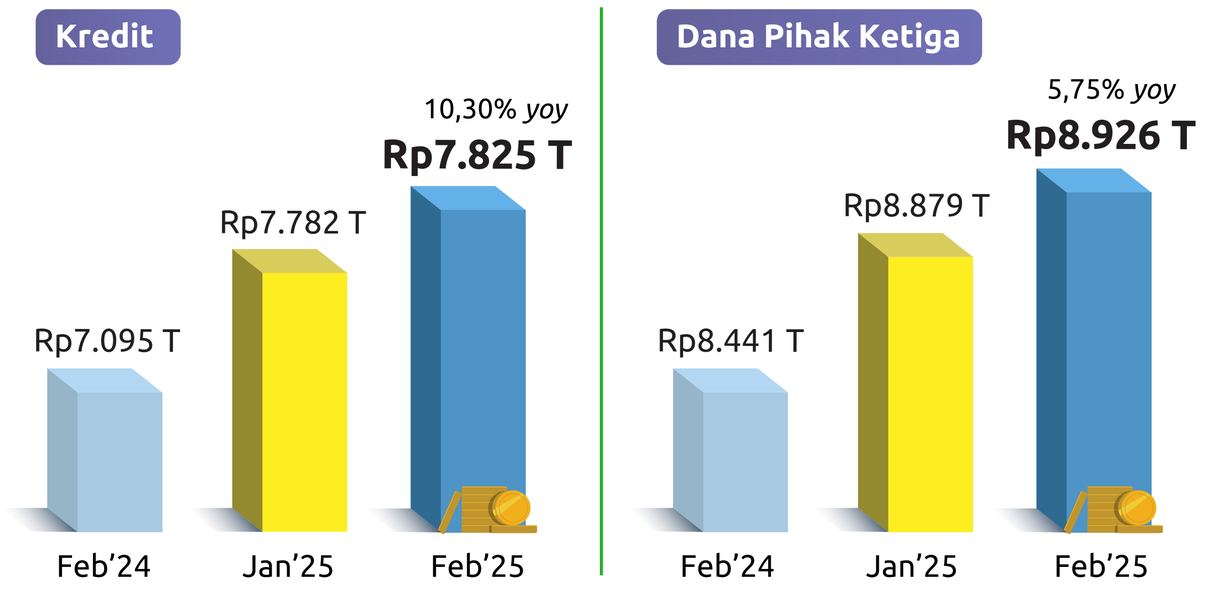

Kredit Investasi

14,62% *yoy* — Feb'25

Kredit Modal Kerja

7,66% *yoy* — Feb'25

Kredit Konsumsi

10,31% *yoy* — Feb'25

CAR	AL/NCD	AL/DPK	LaR
26,98%	116,76%	26,35%	9,77%
Feb'25	Feb'25	Feb'25	Feb'25

NIM	NPL Gross	RoA
4,39%	2,22%	2,41%
Feb'25	Feb'25	Feb'25

Sumber: Siaran Pers OJK Nomor SP 60/GKPB/OJK/IV/2025

OTORITAS JASA KEUANGAN

PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN (PPDP)

Aset Asuransi (Rp)

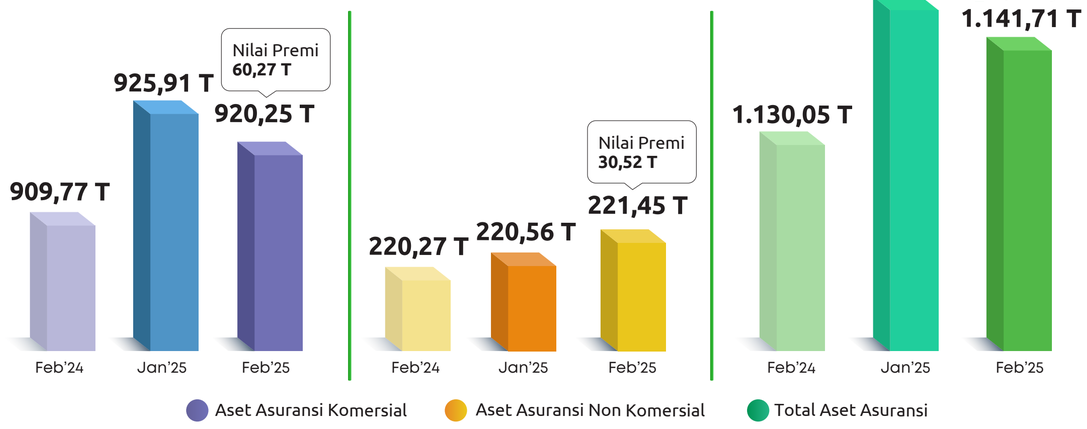

Aset Dana Pensiun (Rp)

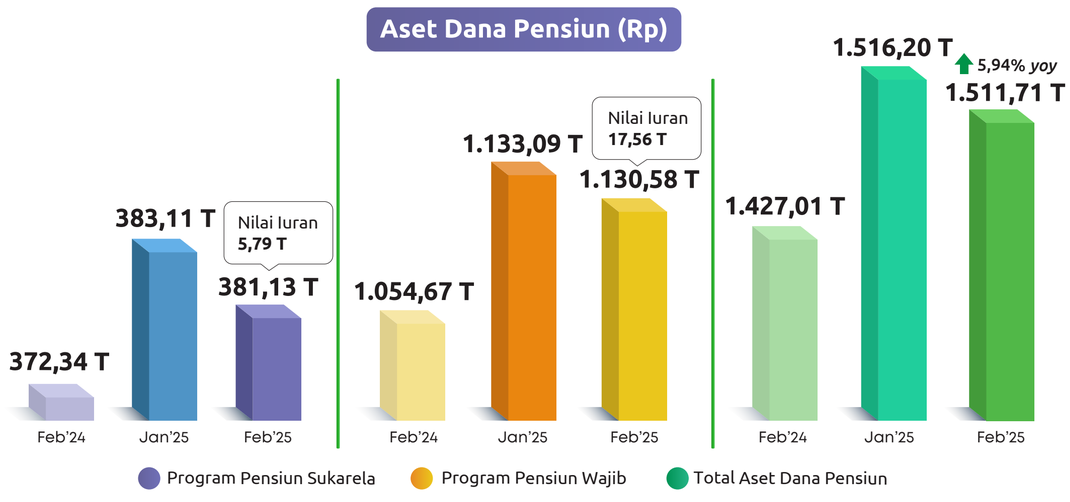

Aset Perusahaan Penjaminan

Feb'24	Rp46,73 T
Jan'25	Rp46,59 T
Feb'25	Rp46,59 T

-0,30% *yoy*

Nilai Imbal Jasa Penjaminan Feb'25

Rp1,40 T

RBC Asuransi Jiwa Feb'25

466,40%

RBC Asuransi Umum dan Reasuransi Feb'25

317,88%

LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

Piutang Pembiayaan

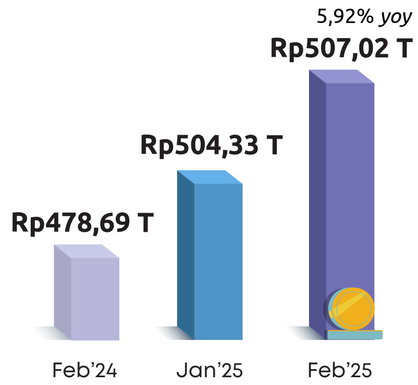

Outstanding Pembiayaan *Fintech P2P Lending*

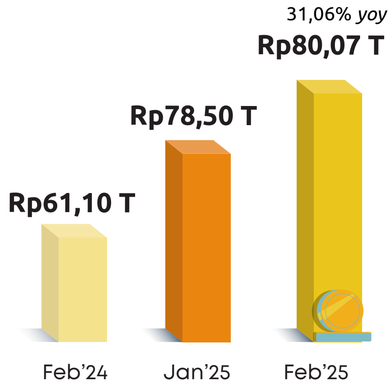

Pembiayaan Modal Ventura

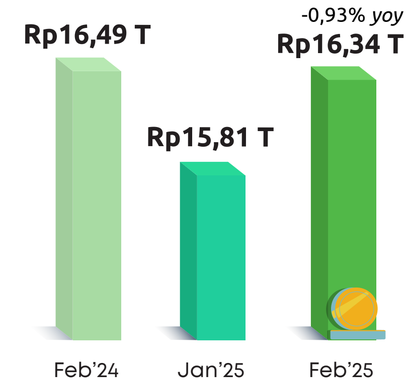

TWP 90 *Fintech* P2P *Lending*
2,78%
Feb'25

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan
2,20x
Feb'25

NPF Perusahaan Pembiayaan (*gross*)
2,87%
Feb'25

INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Regulatory Sandbox Maret 2025

227 Permohonan Konsultasi

15 Permohonan *Sandbox*

5 Peserta *Sandbox*

Aset Kripto

Transaksi Kripto

32,78 T
Feb'25

Daftar Aset Kripto

1.396
Mar'25

Penyelenggara ITSK

PAJK **15** Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) **Mar'25**

Nilai Aset **Rp162,79 Miliar** | Feb'25

PKA **10** Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) **Mar'25**

Nilai Aset **Rp433,72 Miliar** | Feb'25

SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasar Modal Syariah Mar 2025

- *Market Share* **57,63%**
- AUM Reksa Dana Syariah **Rp53,26 T**
- Penghimpunan Dana SCF Syariah **Rp802,48 M**
- Indeks Saham Syariah (ISSI) **201,42** ▼ -6,60% *ytd*
- *Market Cap* Saham Syariah **Rp6.403,94 T**

Perbankan Syariah Feb 2025

- Aset **Rp949,56 T**
- NPF *Gross* **2,21%**
- Pembiayaan **Rp642,64 T** (9,17% *yoy*)
- DPK **Rp729,56 T** (7,91% *yoy*)
- *Market Share* **Rp7,46%**

PVML Syariah Feb 2025

- Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah **Rp33,90 T**
- Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah **Rp3,95 T**
- *Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan Syariah **0,94 x**
- *Market Share* PVML Syariah (aset) **11%**

PPDP Syariah Feb 2025

- Aset Asuransi Jiwa Syariah **Rp33,76 T**
- Aset Asuransi Umum Syariah **Rp9,50 T**
- Aset DPPK-PPMP Syariah **Rp1,85 T**
- Aset DPPK-PPIP Syariah **Rp1,01 T**
- Aset DPLK Syariah **Rp1,74 T**
- Aset Penjaminan Syariah **Rp6,42 T**
- Aset Reasuransi Syariah **Rp2,93 T**
- Market Share PPDP Syariah (aset) **2,10%**

PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program Literasi dan Edukasi Keuangan
(ytd 31 Maret 2025)

Kegiatan Edukasi
- **1.394** kegiatan edukasi
- **5.431.225** peserta

Sikapi Uangmu
- **80** konten Edukasi
- **373.193** *viewers*

LMSKU OJK
- **4.424** pengguna
- **1.999** kali akses modul
- **755** sertifikat kelulusan modul

TPAKD

552 TPAKD
(*ytd* 31 Maret 2025)

100% (dari total Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Indonesia)

GERAK Syariah
- **Rp1,9 T** Penghimpunan Dana
- **Rp4,6 T** Penyaluran Dana
- **Rp30,75 M** Penyaluran dana sosial kepada **158.203 orang** menjangkau **154 kabupaten/kota**
- **2.863** kegiatan
- **6.350.276** peserta

Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (ytd 14 Maret 2025)

102.319 Layanan Konsumen

9.068 pengaduan APPK

- **37,31%** Bank
- **36,42%** Fintech
- **3,50%** Asuransi
- **21,40%** Perusahaan Pembiayaan
- **1,37%** Pasar Modal dan IKNB Lainnya

520 pengaduan berindikasi pelanggaran; **542** sengketa ke LAPS SJK

79,51% selesai melalui *Internal Dispute Resolution*

(21 s.d 31 Maret 2025)

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) (s.d 31 Maret 2025)

79.969 laporan pengaduan penipuan transaksi keuangan

35.394 rekening diblokir

Rp1,7 T total kerugian

Rp134,7 M Dana telah Diblokir

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal
(31 Maret 2025)

- **1.332** entitas keuangan ilegal dihentikan
- **209** Investasi Ilegal
- **1.123** Pinjaman *Online* Ilegal
- **1.643** Kontak debt collector Pinjol Ilegal diajukan pemblokiran

Sumber: Siaran Pers OJK Nomor SP 60/GKPB/OJK/IV/2025

OTORITAS JASA KEUANGAN

Arah Kebijakan OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

A. Menerbitkan kebijakan buyback saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Hingga 8 April 2025, terdapat 19 Emiten yang berencana untuk melakukan relaksasi kebijakan *buyback* tanpa RUPS pada periode Maret s.d. Juli 2025, dengan perkiraan alokasi dana *buyback* sebesar Rp14,86 triliun. Terdapat 8 dari 19 emiten yang telah melakukan pelaksanaan *buyback* dengan nilai realisasi sebesar Rp309,71 miliar.

B. Melakukan penundaan implementasi pembiayaan transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek yang berlaku sampai dengan 6 bulan.

C. Terkait dengan pengenaan tarif resiprokal, OJK mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah untuk melakukan negosiasi dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional dan terus menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait guna merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan termasuk untuk industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal.

D. OJK melalui Bursa Efek Indonesia menempuh kebijakan penyesuaian batasan *trading halt* dalam hal IHSG mengalami penurunan dan penyesuaian batasan *auto rejection* bawah saham.

Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

A. Menetapkan penyesuaian batas akhir penyampaian laporan sehubungan dengan hari libur lebaran dan cuti bersama.

B. Memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan, serta mendorong intermediasi yang optimal.

C. Menetapkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
   1. POJK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
   2. POJK Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.
   3. SEOJK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

D. Dalam tahap penyusunan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
   1. RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin serta RPOJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
   2. RPOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi PPDP dan RPOJK tentang Tingkat Kesehatan bagi PPDP.
   3. RPOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama dan Penilaian Kembali Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
   4. RSEOJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
   5. RSEOJK tentang Layanan Pembiayaan *Digital Buy Now Pay Later* oleh Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
   6. RSEOJK tentang Laporan Keuangan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
   7. RSEOJK tentang Pelaporan Penyelenggara ITSK yang memiliki izin usaha di OJK.
   8. Kajian dan Pedoman Keamanan Siber untuk Pedagang Aset Keuangan Digital, bekerjasama dengan *Technical Assistant* dari British Embassy, dibantu konsultan khusus dengan keahlian keamanan siber.

E. Mendukung optimalisasi pengelolaan BUMN melalui BPI Danantara yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional. OJK terus mempererat koordinasi dan sinergi baik dengan BPI Danantara maupun pihak terkait lainnya agar BUMN sebagaimana dimaksud tetap dapat tumbuh berkesinambungan, dengan mengedepankan praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

F. Meluncurkan aplikasi Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (https://data.ojk.go.id) sebagai akses dan pusat informasi bagi masyarakat dan *stakeholders* terkait data di sektor jasa keuangan.

G. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) berkala setiap 3 bulan untuk ketiga industri PPDP yang telah memiliki peta jalan, yaitu industri asuransi, dana pensiun, dan penjaminan.

H. Untuk memperkuat sektor IAKD, pada 2025 OJK akan melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga dan institusi internasional terkait pengembangan serta pertukaran data dalam rangka pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital serta aset kripto.

Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

A. Sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Desember 2023, dimana 29 unit usaha syariah menyatakan akan melakukan *spin-off*. Pada tahun 2025 direncanakan 18 UUS melakukan *spin-off* dan 8 UUS akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi yang telah ada.

B. Rencana penyusunan buku khutbah PPDP syariah yang dapat digunakan oleh para pemuka agama maupun tenaga pengajar untuk memberikan literasi terkait asuransi syariah kepada masyarakat.

C. Pelaksanaan kajian pengembangan asuransi karbon syariah, yang antara lain memuat potensi dukungan asuransi syariah pada perdagangan karbon.

D. OJK bersama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, dan Kementerian Agama RI, meluncurkan program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Wilayah Pedesaan melalui pembentukan Unit Layanan Keuangan Syariah, sebagai salah satu upaya peningkatan inklusi keuangan syariah hingga masyarakat pelosok melalui optimalisasi peran strategis Penyuluh Agama di Desa dalam memberikan edukasi mengenai keuangan syariah kepada masyarakat.

Penguatan Tata Kelola OJK

A. Meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Tingkat Nasional dan peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi pada kategori Kementerian/lembaga tahun 2024 yang merupakan pencapaian ketujuh kalinya bagi OJK sejak tahun 2016.

B. OJK berkomitmen untuk senantiasa menerapkan *best practices* dalam rangka implementasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di internal OJK, antara lain dalam pelaksanaan asuransi, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan penguatan integritas melalui sinergi dengan kementerian/lembaga untuk membagikan pengalaman penerapan *best practices*.

C. Melalui penyelenggaraan Forum GRC yang dilaksanakan setiap tahun, OJK secara berkelanjutan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, LJK, dan Asosiasi Profesi di bidang GRC a.l. melalui penguatan integritas pelaporan keuangan di SJK melalui penerapan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR).

D. Berkomitmen untuk terus menjaga prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan program pengendalian gratifikasi, termasuk saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 27 Maret 2025:

141 Perkara Selesai — **115** perkara Perbankan; **20** perkara PPDP; **5** perkara PMDK; **1** perkara PVML

121 Putusan Pengadilan — **110** *in Kracht*; **9** kasasi; **2** banding

Sumber: Siaran Pers OJK Nomor SP 60/GKPB/OJK/IV/2025